

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN : FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBLAKAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  <b>KEGIATAN :</b> Administrasi Tata Pemerintahan  <b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah  <b>TUJUAN :</b> Untuk memperngali Hari Besar Nasional dan Hari Besar Daerah	Kegiatan ini memfasilitasi pengalaman hari besar nasional (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Otonomi Daerah) dan hari besar daerah (Hari Ulang Tahun Kabupaten Solok Selatan) tingkat Kabupaten Solok Selatan	<b>AKSES :</b> 1. Undangan peserta biasanya terbatas pada pihak-pihak tertentu 2. Pendistribusian undangan terkadang mengalami keterlambatan di tingkat kecamatan	1. Jumlah peserta yang diundang terbatas 2. Waktu dalam penyampaian undangan yang sering mendekati pelaksanaan acara	1. Masih kurangnya fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut 2. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut 3. Masih belum adanya sarana dan prasarana bagi kaum disabilitas untuk mengikuti kegiatan tersebut	Memfasilitasi dalam rangka memperngali Hari Besar Nasional dan Hari Besar Daerah	Meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperngali hari besar nasional dan hari besar daerah	1. Peserta kegiatan Memperngali Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini terdiri dari 400 orang (60 % perempuan dan 40 % laki-laki) 2. Peserta kegiatan Memperngali Hari Ulang Tahun Kabupaten ini terdiri dari 1.800 orang (60 % perempuan dan 40 % laki-laki) 3. Peserta kegiatan Memperngali Hari Otonomi Daerah ini terdiri dari 100 orang (60 % perempuan dan 40 % laki-laki)	<b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah  <b>INPUT :</b> Rp. 410.000.000,-  <b>OUTPUT :</b> Terasilasiya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah  <b>OUTCOME :</b> Tersedianya sarana dalam rangka memperngali hari besar nasional dan hari besar daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
	<p>Fotokopinda, tokoh pemekaran, organisasi rantau, kabupaten/kota se-Sumatera Barat/ Provinsi Sumbar, Kab/Kota pedatasan, mantan Bupati Solok Selatan, mantan anggota DPRD Solok Selatan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, tim sukses anggota DPRD di kecamatan sebanyak 1.800 undangan.</p> <p>Persentase kehadiran laki-laki 40 persen dan persentase kehadiran perempuan 50 persen</p> <p>Dalam kegiatan menghadiri Hari Otonomi Daerah ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Fotokopinda sebanyak 100 undangan.</p> <p>Persentase kehadiran laki-laki 40 persen dan persentase kehadiran perempuan 50 persen</p>							

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

  
(.....)

(.....)  
(.....)

# **GENDER BUDGET STATEMENT / GBS (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN : FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Administrasi Tata Pemerintahan	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi peringatannya	
Tujuan Kegiatan	Untuk memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Besar Daerah	
Analisa Situasi	<p>➢ <b>AKSES :</b></p> <p>➢ Undangan peserta biasanya terbatas pada pihak-pihak tertentu</p> <p>➢ Keterlibatan dalam penyampaian undangan di tingkat kecamatan</p> <p><b>PARTISIPASI :</b></p> <p>Peserta yang hadir biasanya lebih banyak perempuan, karena jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki di seluruh instansi</p> <p><b>KONTROL :</b></p> <p>Jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki di setiap instansi</p> <p><b>MANFAAT :</b></p> <p>Tidak semua pihak merasakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut</p> <p>➢ Jumlah peserta yang diundang terbatas</p> <p>➢ Waktu dalam penyampaian undangan yang sering mendekati pelaksanaan acara</p> <p>➢ Masih kurangnya fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut</p> <p>➢ Masih rendahnya respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperingati hari besar nasional dan hari besar daerah



	Komponen 2	
	Komponen 3	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 410.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Terasilisasinya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah	

  
**PENGUNA ANGGARAN,**  
DR. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM  
 NIP. 197312301993031002

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN : PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			Indikator Gender
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	
<b>PROGRAM :</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  <b>KEGIATAN :</b> Fasilitasi dan Koordinasi Hukum  <b>SUB KEGIATAN :</b> Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum  <b>TUJUAN :</b> Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berkembang	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum ini memberikan pemahaman diri atau ilmu dasar yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat agar perilaku masyarakat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku  Undang-undang berjumlah sebanyak 39 Negeri yang masing-masing negeri mengutus 5 orang (total jumlah 195 orang)  Pemerintah kehadiran laki-laki 55 persen dan perempuan kehadiran perempuan 45 persen	<b>AKSES :</b> Dalam pendistribusian undangan terkendala karena ada negeri yang transportasi kendaraan menggunakan kendaraan transportasi khusus  <b>PARTISIPASI :</b> Para peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini  <b>KONTROL :</b> Secara umum peserta memenuhi undangan  <b>MANFAAT :</b> Memberikan pemahaman mengenai hukum sedini mungkin yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat	Kendala dalam penyampaian undangan karena ada negeri yang memerlukan transportasi khusus untuk menjangkaunya	Masih belum adanya sarana dan prasarana bagi kaum disabilitas untuk mengikuti kegiatan tersebut	Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berkembang	Meningkatkan keterlibatan semua pihak dan mengikutsertakan masyarakat disabilitas dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut	Peserta kegiatan ini berjumlah 195 orang yang terdiri dari 55 persen laki-laki dan 45 persen perempuan	<b>SUB KEGIATAN :</b> Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum  <b>INPUT :</b> Rp. 100.000.000,-  <b>OUTPUT :</b> Tertaksananya sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan untuk kelompok sadar hukum di tingkat negeri  <b>OUTCOME :</b> Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



# **GENDER BUDGET STATEMENT / GBS** **(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN**

**: SEKRETARIAT DAERAH**  
**: PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM**

Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
Sub Kegiatan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	
Tujuan Kegiatan	Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berkembang	
Analisa Situasi	<p>➤ <b>AKSES :</b> Dalam pendistribusian undangan terkendala karena ada nagari yang transportasiya menggunakan kendaraan/ transportasi khusus</p> <p><b>PARTISIPASI :</b> Para peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini</p> <p><b>KONTROL :</b> Secara umum peserta memenuhi undangan</p> <p><b>MANFAAT :</b> Memberikan pemahaman mengenai hukum sedini mungkin yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat</p> <p>➤ Kendala dalam penyampaian undangan karena ada nagari yang memerlukan transportasi khusus untuk menjangkaunya</p> <p>➤ Masih belum adanya sarana dan prasarana bagi kaum disabilitas untuk mengikuti kegiatan tersebut</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Meningkatkan keterlibatan semua pihak dan mengikutsertakan masyarakat disabilitas dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut
	Komponen 2	



	Komponen 3	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 100.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Tertaksananya sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan untuk kelompok sadar hukum di tingkat nagari	


  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIMALA
   
 PENGUNA ANGGARAN,
   
 Dr. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM
   
 S.O.L CNIP: 187312301993031002

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUB KEGIATAN : FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  <b>KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  <b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  <b>TUJUAN :</b> 1. Peningkatan kafilah untuk ke tingkat Provinsi	Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor ..... Tahun 2023 tentang Penunjukan tuan rumah MTQ Nasional ke-41 tingkat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024  Dalam kegiatan pelaksanaan MTQ Nasional Tk. Kabupaten mengikutsertakan seluruh Kafilah Kecamatan se Kabupaten Solok Selatan (40 cabang, jumlah total peserta 80 orang), dewan juri 60 orang, panitia 48 orang, panitia 300 orang  Persentase kehadiran laki-laki 50 persen dan persentase kehadiran perempuan 50 persen	<b>AKSES :</b> Ditamatkan kepada peserta ulusan dari Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan  <b>PARTISIPASI :</b> Peserta laki-laki dan perempuan kafilah dari Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan  <b>KONTROL :</b> Kecamatan masih ada yang belum mengirimkan beberapa cabang lomba  <b>MANFAAT :</b> Adanya ulusan seluruh cabang lomba untuk ikut serta dalam MTQ tingkat Provinsi	1. Jumlah peserta yang diundang terbalas 2. Panitia harus saling kerjasama dalam pelaksanaan MTQ Nasional Tk. Kabupaten Solok Selatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut	Adanya ulusan kafilah Kabupaten Solok Selatan untuk mengikuti MTQ Provinsi	Adanya kafilah laki-laki dan perempuan untuk semua cabang lomba	1. Dalam pelaksanaan MTQ, peserta difasilitasi dengan sebaik-baiknya agar dapat mengikuti seleksi dengan baik dan lancar 2. Menjadikan peserta MTQ yang bisa bersaing di tingkat Provinsi	<b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  <b>INPUT :</b> Rp. 5.332.000.000,-  <b>OUTPUT :</b> Terlaksananya MTQ Nasional Tk. Kabupaten Solok Selatan  <b>OUTCOME :</b> Adanya kafilah seluruh cabang untuk MTQ Provinsi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Isi Kegiatan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Surat Keputusan Bupati Solok Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 tentang Pembentukan Guru Tahfidz	<b>KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat <b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual <b>TUJUAN :</b> 2. Pembentukan Guru Tahfidz	<b>AKSES :</b> Ditamatkan kepada peserta utusan dari jorong yang bersangkutan <b>PARTISIPASI :</b> Lebih banyak peserta perempuan berpartisipasi dari pada Peserta laki-laki <b>KONTROL :</b> Masih ada jorong yang belum mengirimkan guru untuk penjaringan menjadi guru tahfidz <b>MANFAAT :</b> Terperuhnya kuota guru tahfidz sebanyak 275 jorong se-kabupaten solok selain dengan menunjuk guru yang jorongnya tidak mengutus	1. Jumlah peserta yang diundang terbatas 2. Panitia dan Tim Seleksi harus saling kejasama dalam penjaringan guru tahfidz	Masih kurangnya informasi bagi jorong yang jauh dalam penjaringan guru tahfidz	Terpenuhi jumlah guru tahfidz di seluruh jorong di Kabupaten Solok Selatan	Adanya guru tahfidz laki-laki dan perempuan di seluruh jorong	1. Dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan guru tahfidz, peserta didasiliasi dengan sebaik-baiknya agar dapat mengikut seleksi dengan baik dan lancar 2. Menjadikan peserta bisa lolos menjadi guru tahfidz	<b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual <b>INPUT :</b> <b>OUTPUT :</b> Terbentuknya seluruh guru tahfidz di seluruh jorong di Kabupaten Solok Selatan <b>OUTCOME :</b> Terangikannya honor guru tahfidz se K apatan Solok Selatan sebesar Rp. 500.000 per bulan

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**

**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



### GENDER BUDGET STATEMENT / GBS (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN : FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL**

Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah Kafliah yang difasilitasi	
Tujuan Kegiatan	Penjaringan kafliah untuk ke tingkat Provinsi	
Analisa Situasi	<p>➤ <b>AKSES :</b> Ditamatkan kepada peserta utusan dari Kecamatan Se Kabupaten Solok Selatan</p> <p><b>PARTISIPASI :</b> Peserta laki-laki dan perempuan kafliah dari Kecamatan Se Kabupaten Solok Selatan</p> <p><b>KONTROL :</b> Masih kecamatan ada yang belum mengirimkan beberapa cabang lomba</p> <p><b>MANFAAT :</b> Adanya utusan seluruh cabang lomba untuk ikut serta dalam MTQ tingkat Provinsi</p> <p>➤ Jumlah peserta yang diundang terbatas Panitia harus saling kerjasama dalam pelaksanaan MTQ Nasional Tk. Kabupaten Solok Selatan</p> <p>➤ Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Adanya kafliah laki-laki dan perempuan untuk semua cabang lomba
	Komponen 2	
	Komponen 3	

Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 5.332.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan		Adanya kafilah seluruh cabang untuk MTQ Provinsi	
Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Pembentukan Guru Tahfidz		
Tujuan Kegiatan	Penjaringan Guru Tahfidz		
Analisa Situasi	<p><b>AKSES :</b> Ditamatkan kepada peserta utusan dari jorong yang bersangkutan</p> <p><b>PARTISIPASI :</b> Lebih banyak peserta perempuan berpartisipasi dari pada Peserta laki-laki</p> <p><b>KONTROL :</b> Masih ada jorong yang belum mengizinkan guru untuk penjaringan menjadi guru tahfidz</p> <p><b>MANFAAT :</b> Terpenuhinya kuota guru tahfidz sebanyak 275 jorong se-kabupaten solok selatan dengan menunjuk guru yang jorongnya tidak mengulus Masih kurangnya informasi bagi jorong yang jauh dalam penjaringan guru tahfidz Masih kurangnya informasi bagi jorong yang jauh dalam penjaringan guru tahfidz</p>		
Rencana Aksi	Komponen 1	Adanya guru tahfidz laki-laki dan perempuan di seluruh jorong	
	Komponen 2		
	Komponen 3		
Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 5.332.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan		Terbentuknya seluruh guru tahfidz di seluruh jorong di Kabupaten Solok Selatan	

  
PENGUNA ANGARAN,  
Dr. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM  
NIP. 197312301993031002

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Pementahan dan Kesejahteraan Rakyat  <b>KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  <b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat  <b>TUJUAN :</b> Penyerahan seragam gratis bagi peserta didik baru RA, MI, MTs, SLTA	Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor : .... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Baru di Kabupaten Solok Selatan  Dalam kegiatan penyaluran pakaian seragam gratis mengikut seratakan seluruh peserta didik baru RA, MI, MTs, SLTA se Kabupaten Solok Selatan  Persentase jumlah peserta didik baru laki-laki 50 persen dan perempuan 50 persen	<b>AKSES :</b> Diutamakan seluruh peserta didik baru RA, MI, MTs, SLTA  <b>PARTISIPASI :</b> Peserta didik baru perempuan dan Peserta laki-laki di Kabupaten Solok Selatan  <b>KONTROL :</b> Lengkapinya data siswa baru di semua tingkat pendidikan  <b>MANFAAT :</b> Terpenuhiya kuala semua pakaian seragam gratis bagi semua tingkat pendidikan			Tersedianya seluruh pakaian seragam gratis bagi peserta didik baru  Adanya peserta didik baru laki-laki dan perempuan di kabupaten Solok Selatan	Dalam pelaksanaan pengadaan pakaian seragam gratis, perlu dibuktikan data peserta didik baru yang valid	<b>SUB KEGIATAN :</b> Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat  <b>INPUT :</b> Rp. 100.000.000,-  <b>OUTPUT :</b> Terpenuhiya pengadaan seragam gratis bagi peserta didik baru RA, MI, MTs, dan SLTA se-Kabupaten Solok Selatan  <b>OUTCOME :</b> Terangkatnya anggaran untuk pakaian seragam gratis bagi peserta didik baru RA, MI, MTs, dan SLTA se-Kabupaten Solok Selatan	



# **GENDER BUDGET STATEMENT / GBS (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH  
SUB KEGIATAN**

**: SEKRETARIAT DAERAH  
: PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Belanja Barang Yang akan diserahkan ke masyarakat	
Tujuan Kegiatan	Penyerahan bantuan seragam sekolah bagi peserta didik baru RA, MI, MTs, dan SLTA	
Analisa Situasi	<p><b>AKSES :</b> Ditamatkan seluruh peserta didik baru RA, MI, MTs, SLTA</p> <p><b>PARTISIPASI :</b> Peserta didik baru perempuan dan Peserta laki-laki di Kabupaten Solok Selatan</p> <p><b>KONTROL :</b> Lengkapinya data siswa baru di semua tingkat pendidikan</p> <p><b>MANFAAT :</b> Terpenuhinya kuota semua pakaian seragam gratis bagi semua tingkat pendidikan</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Tersedianya seluruh pakaian seragam gratis bagi peserta didik baru
	Komponen 2	
	Komponen 3	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 100.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Terpenuhinya pengadaan seragam gratis bagi peserta didik baru RA, MI, MTs, dan SLTA se-Kabupaten Solok Selatan	

PEMERINTAH KABUPATEN  
SETDA  
D. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM  
NIP. 197312301993031002

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN : FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <b>KEGIATAN :</b> Peningkatan Organisasi <b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana merupakan salah satu cara untuk memastikan pelayanan publik di setiap Perangkat Daerah terlaksana sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 supaya masyarakat sebagai pengguna layanan dapat terpenuhi dengan setiap layanan yang diberikan.	<b>AKSES :</b> Informasi/Undangan/Pembahasan tersampaikan dengan baik. <b>PARTISIPASI :</b> Perangkat Daerah/Unit Layanan ada yang antusias menanggapi ada yang tidak ada yang tidak peduli sama sekali	✓ Dalam pendistribusian undangan atau semacam pemberitahuan via Wa ada beberapa Perangkat Daerah/Unit Layanan yang kurang antusias dalam membaca dan memahami setiap informasi, dan bahkan ada yang tidak menghiraukan sama sekali. ✓ Ada unit layanan yang menganggap fasilitas pelayanan publik dan tata laksana ini hanya untuk pemenuhan syarat penilaian rutin saja.	✓ Masih adanya pemahaman dari unit layanan jika standar pelayanan yang berupa penyediaan sarana prasarana khusus (ruang ibu menyusui/tempat bermain anak, pojok baca, dll), layanan disabilitas (rambatan dan kursi roda) hanya bagi unit layanan kesehatan saja seperti RSUD dan Puskesmas, padahal layanan dibutuhkan khusus dan disabilitas ini harus ada pada setiap unit layanan.	Tercapainya Pelayanan Publik yang Berkelanjutan, merata, dan responsif gender pada Setiap Perangkat Daerah	✓ Dalam pelaksanaan fasilitasi pelayanan publik akan lebih ditekankan pentingnya penyediaan sarana-prasarana khusus seperti ruang ibu menyusui, ruang bermain anak, kursi roda dan rambatan disabilitas. ✓ Memberikan pemahaman yang baik bahwa fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana ini bukan sekedar ajang untuk mengikuti penilaian dari lembaga lain saja, tetapi memang betul-betul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.	Peserta kegiatan ini berjumlah 39 orang yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 26 orang perempuan	<b>SUB KEGIATAN :</b> Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana <b>INPUT :</b> Rp. 100.000.000,- <b>OUTPUT :</b> Terselenggaranya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Seluruh Perangkat Daerah/Unit Layanan <b>OUTCOME :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata laksana di setiap Perangkat Daerah/Unit Layanan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat diselap berurusan dengan pemerintah.

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



**GENDER BUDGET STATEMENT / GBS  
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH  
SUB KEGIATAN**

**: SEKRETARIAT DAERAH  
: FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA**

Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Penataan Organisasi	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan yang difasilitasi Pemenuhan Kepatuhan Standar Pelayanan	
Tujuan Kegiatan	Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	
Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi/Undangan/Pemberitahuan Fasilitasi tersampaikan dengan baik.</li> <li>2. Perangkat Daerah/Unit Layanan ada yang antusias menanggapi ada yang tidak, ada yang tidak peduli sama sekali</li> <li>3. Fasilitasi yang diikuti setiap perangkat daerah tercemin hanya karena terpaksa karena adanya penilaian dari penilai internal maupun dari lembaga lain seperti Ombudsman dan Kemenpar.</li> <li>4. Manfaat Fasilitasi ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang berurusan ke Unit layanan, seperti tercukupinya standar pelayanan, terpenuhinya sarana dan prasarana layanan yang membuat masyarakat nyaman.</li> <li>5. Masih adanya pemahaman dari unit layanan jika standar pelayanan yang berupa penyediaan sarana prasarana khusus (ruang ibu menyusui, tempat bermain anak, pojok baca, dll), layanan disabilitas (rambatan dan kursi roda) hanya bagi unit layanan kesehatan saja seperti RSUD dan Puskesmas, padahal layanan dibutuhkan khusus dan disabilitas ini harus ada pada setiap unit layanan.</li> </ol>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Dalam pelaksanaan fasilitasi pelayanan publik akan lebih ditekankan pentingnya penyediaan sarana-prasarana khusus seperti ruang ibu menyusui, ruang bermain anak, kursi roda dan rambatan disabilitas;
	Komponen 2	Memberikan pemahaman yang bahwa fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana ini bukan sekedar ajang untuk mengikuti penilaian dari lembaga lain saja, tetapi memang betul-betul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 100.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Layanan demi terciptanya kualitas pelayanan publik dan tata laksana di setiap Perangkat Daerah/Unit Layanan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat disetiap berurusan dengan pemerintah.	



## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

### PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH SUB KEGIATAN : PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUAKAAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  <b>KEGIATAN :</b> Penaatan Organisasi  <b>SUB KEGIATAN :</b> Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  <b>TUJUAN :</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur bernilai tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu cara dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta kapasitas pengisian kinerja pelayanan publik.	<b>AKSES :</b> ASN laki-laki dan Perempuan memiliki hak akses yang sama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien.  <b>PARTISIPASI :</b> Perangkat Daerah di dominasi oleh ASN	✓ Masih minimnya pemahaman ASN Perempuan dalam pelaksanaan pelayanan	✓ Adanya Anggarap bahwa ASN Perempuan tidak cakatan dalam pelayanan lapangan	Terwujudnya ASN perempuan yang cakatan dalam pelayanan di lapangan	✓ Pemberian Diklat sesuai dengan kebutuhan pelayanan.	✓ Peserta Diklat Pelatihan keterampilan	<b>SUB KEGIATAN :</b> Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  <b>INPUT :</b> Rp. 219.655.340  <b>OUTPUT :</b> Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja daerah yang disusun  <b>OUTCOME :</b> Nilai SAKIP

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**GENDER BUDGET STATEMENT / GBS  
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN : PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI**

Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Penataan Organisasi	
Sub Kegiatan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja daerah yang disusun	
Tujuan Kegiatan	Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
Analisa Situasi	ASN laki-laki dan Perempuan memiliki hak akses yang sama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien.	
Rencana Aksi	Komponen 1	Pemberian Diklat sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 219.655.340	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Tertaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik	

  
**PENGUNA ANGGARAN,**  
**Dr. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM**  
**NIP. 197312301993031002**

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**  
**SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Program Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  <b>KEGIATAN :</b> Penataan Organisasi  <b>SUB KEGIATAN :</b> Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  <b>TUJUAN :</b> Terpainya Reformasi Birokrasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan merupakan salah satu cara untuk memastikan Struktur Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	<b>AKSES :</b> Bimbingan Teknis/Informatika/Undangan/ Pemberitahuan tersampaikan dengan baik.  <b>PARTISIPASI :</b> Perangkat Daerah menanggapi dengan antusias	✓ Dalam pendistribusian undangan atau semacam pemberitahuan via Wa ada beberapa Perangkat Daerah/ Unit Layanan yang termasuk antusias dalam pelaksanaan kegiatan	✓ Mengingat kegiatan ini sudah berulang kali dilaksanakan sehingga Peserta kegiatan sudah memahami bagaimana sistem kerja dalam pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terpenuhinya Perangkat Daerah tepat Struktur tepat fungsi dan Penempatan ASN sesuai Kompetensi	✓ Perangkat Daerah melakukan evaluasi terkait struktur organisasinya serta Evaluasi terhadap jabatan yang ada pada Perangkat Daerah tersebut, untuk selanjutnya difasilitasi oleh Bagian Organisasi	✓ Peserta kegiatan ini berjumlah ± 60 orang yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 36 orang perempuan	<b>SUB KEGIATAN :</b> Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  <b>INPUT :</b> Rp. 100.000.000.-  <b>OUTPUT :</b> Terwujudnya SOTK perangkat daerah serta terevaluasinya Anjab ABK pada perangkat daerah  <b>OUTCOME :</b> Terpenuhinya Perangkat Daerah tepat Struktur Penempatan ASN sesuai Kompetensi

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

### PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

SUB REFORMASI								
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<b>PROGRAM :</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  <b>KEGIATAN :</b> Penilaian Organisasi  <b>SUB KEGIATAN :</b> Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  <b>TUJUAN :</b> Tercapainya Reformasi Birokrasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan merupakan salah satu cara utk memastikan Struktur Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	<b>AKSES :</b> Bimbingan Teknis/Informasi/Undangan/ Pemberitahuan tersampaikan dengan baik.  <b>PARTISIPASI :</b> Perangkat Daerah menanggapi dengan antusias	✓ Dalam pendistribusian undangan atau semacam pemberitahuan via Wa ada beberapa Perangkat Daerah/ Unit Layanan yang termasuk antusias dalam pelaksanaan kegiatan	✓ Mengingat kegiatan ini sudah berulang kali dilaksanakan sehingga Peserta kegiatan sudah memahami bagaimana sistem kerja dalam pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tercapainya Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tepat Struktur tepat fungsi dan Penempatan ASN sesuai Kompetensi	✓ Perangkat Daerah melakukan evaluasi terkait struktur organisasinya serta Evaluasi terhadap jabatan yang ada pada Perangkat Daerah tersebut, untuk selanjutnya difasilitasi oleh Bagian Organisasi	✓ Peserta kegiatan ini berjumlah ± 60 orang yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 36 orang perempuan	<b>SUB KEGIATAN :</b> Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  <b>INPUT :</b> Rp. 100.000.000,-  <b>OUTPUT :</b> Terevaluasi SOTK perangkat daerah serta terelaksasinya Anjab ABK pada perangkat daerah  <b>OUTCOME :</b> Tercapainya Perangkat Daerah Tepat Struktur tepat fungsi dan Penempatan ASN sesuai Kompetensi

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

(.....)  
(.....)  
(.....)



**GENDER BUDGET STATEMENT / GBS  
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

**PERANGKAT DAERAH  
SUB KEGIATAN** : **SEKRETARIAT DAERAH  
: PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN**

Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tercapainya Reformasi Birokrasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Tujuan Kegiatan	Tercapainya Perangkat Daerah Tepat Struktur tepat fungsi dan Penempatan ASN sesuai Kompetensi
Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi/Undangan/Pemberitahuan Fasilitas tersampaikan dengan baik.</li> <li>2. Fasilitas yang diikuti setiap perangkat daerah tercermin antusias karena terkait penataan organisasi perangkat daerah dan penataan ASN pada perangkat daerah tersebut</li> <li>3. Dalam pendistribusian undangan atau semacam pemberitahuan via Wa ada beberapa Perangkat Daerah/ Unit Layanan yang termasuk antusias dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>4. Mengingat kegiatan ini sudah berulang kali dilaksanakan sehingga Peserta kegiatan sudah memahami bagaimana sistem kerja dalam pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan</li> </ol>
Rencana Aksi	<p>Komponen 1</p> <p>Perangkat Daerah melakukan evaluasi terkait struktur organisasinya serta Evaluasi terhadap jabatan yang ada pada Perangkat Daerah tersebut, untuk selanjutnya difasilitasi oleh Bagian Organisasi</p>
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 100.000.000,-
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Tercapainya Perangkat Daerah Tepat Struktur tepat fungsi dan Penempatan ASN sesuai Kompetensi

**PENGUNA ANGGARAN,**  
  
**Dr. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM**